



SILABUS

PENINGKATAN KOMPETENSI TEMATIK BERJENJANG
BAGI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
DI JAWA TENGAH

Tema :

PERAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KECAMATAN BERDAYA
MELALUI LAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PUSKESOS)

SI-PANDU
-kreasi-

Disusun Oleh :

BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL

SILABUS

PENINGKATAN KOMPETENSI TEMATIK BERJENJANG BAGI POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DI JAWA TENGAH

TEMA:

**PERAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL
DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM KECAMATAN BERDAYA
MELALUI LAYANAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)**

SI-PANDU
- kreasi -

**BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026**

SAMBUTAN

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TENGAH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya silabus “Silabus Peningkatan Kompetensi Tematik Berjenjang bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Jawa Tengah”. Silabus ini merupakan respons strategis sekaligus pedoman baku dalam penguatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput melalui optimalisasi Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).

Puskesmas memiliki peran krusial sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial di tingkat desa, kelurahan, hingga kecamatan. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada kesiapan personil termasuk PSKS yang menjadi motor penggerak utama pelayanan di tengah masyarakat. Seiring dengan diinisiasinya program Kecamatan Berdaya, eksistensi PSKS kini dituntut untuk tidak hanya mahir secara administratif, tetapi juga memiliki keterampilan teknis dalam mengintegrasikan layanan.

Silabus silabus ini dirancang secara terstruktur melalui tiga jenjang kompetensi — Dasar, Lanjutan, dan Ahli (ToT) — untuk menjamin setiap PSKS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional serta akuntabel. Fokus utama dalam materi ini mencakup empat pilar program Kecamatan Berdaya, yaitu:

1. Perlindungan perempuan dan anak;
2. Perlindungan lansia dan disabilitas;
3. Pemberdayaan pemuda melalui Taruna Karya Mandiri; serta
4. Pengelolaan *Sport Center*.

Selain itu, seiring perkembangan teknologi, silabus ini juga menekankan pada pemanfaatan sistem informasi melalui aplikasi Puskesmas agar pendataan, verifikasi, dan pengelolaan aduan masyarakat di Jawa Tengah dapat dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

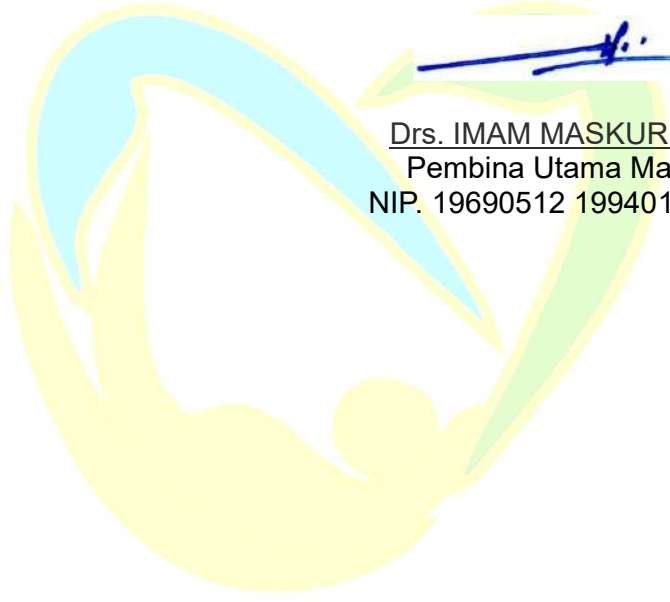
Kami berharap implementasi dari silabus ini mampu menciptakan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, sehingga warga Jawa Tengah dapat memperoleh kepastian layanan sosial yang lebih responsif,

empati, dan manusiawi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan silabus ini. Semoga upaya kolektif ini memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah

Semarang, Juli 2026
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah



Drs. IMAM MASKUR, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19690512 199401 1 001



SI-PANDU
- kreasi -

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Silabus Peningkatan Kompetensi Tematik Berjenjang bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Jawa Tengah untuk tema Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam Implementasi Kecamatan Berdaya Melalui Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas). Silabus ini disusun sebagai respons strategis terhadap kebutuhan penguatan pelayanan sosial di tingkat akar rumput melalui peran Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas).

Seiring dengan diinisiasinya program Kecamatan Berdaya, PSKS sebagai motor penggerak utama dituntut memiliki kompetensi yang mumpuni, tidak hanya dalam urusan administratif, tetapi juga dalam keterampilan teknis integrasi layanan. Layanan tersebut mencakup empat pilar utama: perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, Taruna Karya Mandiri serta pengelolaan *Sport Center*.

Silabus ini dirancang secara terstruktur mulai dari jenjang Dasar, Lanjutan, hingga Ahli (ToT) untuk menjamin bahwa setiap unsur PSKS memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi panduan baku dalam pelaksanaan bimbingan teknis, sehingga tercipta sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat demi mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang lebih berkualitas di Jawa Tengah.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan silabus ini. Semoga upaya kita bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Semarang, Juli 2026
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial



ADONIATI MEYRIA WIDANINGTYAS H, SH., MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19750522 201001 2 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
SAMBUTAN	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Manfaat	8
D. Sasaran	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Metodologi	10
G. Evaluasi Pembelajaran	10
BAB II SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR	13
A. Silabus	13
B. Evaluasi Tingkat Dasar	20
BAB III SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI LANJUTAN	26
A. Silabus	26
B. Evaluasi Tingkat Lanjutan	39
BAB IV SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI AHLI	40
A. Silabus	40
B. Evaluasi	50
BAB V PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	53

SI-PANDU
— kreasi —

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) merupakan lembaga strategis yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelayanan sosial di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Keberhasilan penyelenggaraan Puskesmas sangat bergantung pada kesiapan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai motor penggerak utama pelayanan Puskesmas di masyarakat. PSKS merupakan unsur masyarakat yang memiliki kepedulian dan terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dalam konteks ini, berperan sebagai pengelola dan pelaksana teknis di sekretariat Puskesmas,.

Seiring dengan diinisiasinya program Kecamatan Berdaya, peran PSKS menjadi semakin krusial. PSKS dituntut tidak hanya memiliki pemahaman administratif, tetapi juga keterampilan teknis dalam mengintegrasikan layanan Puskesmas dengan empat pilar utama program Kecamatan Berdaya, yaitu perlindungan perempuan dan anak, perlindungan lansia dan disabilitas, pemberdayaan pemuda melalui Taruna Karya Mandiri, serta pengelolaan *Sport Center*.

Eksistensi PSKS dalam ekosistem Puskesmas dan Kecamatan Berdaya dapat didefinisikan sebagai berikut:

- a. PSKS hadir sebagai elemen inti dalam struktur kelembagaan sekretariat Puskesmas, baik di tingkat desa/kelurahan maupun kabupaten/kota. Keberadaan mereka memastikan bahwa pelayanan sosial tetap berbasis pada kearifan lokal dan kedekatan dengan masyarakat.
- b. PSKS berperan sebagai komunikator, fasilitator, dan mediator antara masyarakat dengan penyedia layanan, Mereka bertugas memberikan informasi program perlindungan sosial secara jelas serta membangun hubungan profesional dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) guna mewujudkan sinergi dalam implementasi program Kecamatan Berdaya,

Adapun peran dan fungsi PSKS didalam Puskesmas dan Kecamatan Berdaya meliputi:

- a. Manajemen Kasus dan Aduan: Melakukan identifikasi masalah, wawancara, asesmen awal, hingga penanganan keluhan masyarakat, termasuk dalam kondisi kedaruratan,
- b. Pemanfaatan Sistem Informasi: Mengoperasikan aplikasi Puskesmas untuk pendataan, verifikasi, dan validasi data aduan agar layanan lebih akuntabel.
- c. Akselerasi Program Kecamatan Berdaya: Memetakan kebutuhan jenis layanan dan skema intervensi sosial secara presisi pada pilar-pilar Kecamatan Berdaya serta menyusun alur rujukan yang responsif.
- d. Pemberdayaan: Menginisiasi dan mengelola jejaring strategis lintas sektor untuk menumbuhkan kemandirian kolektif warga.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kompetensi yang terstruktur bagi PSKS agar Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan perencanaan, identifikasi, dan intervensi masalah sosial secara presisi, akuntabel, dan profesional. Selain itu, dalam pengelolaan Puskesmas, perkembangan teknologi informasi menuntut PSKS untuk mahir dalam menggunakan sistem aplikasi pendataan agar pengelolaan keluhan masyarakat dapat dilakukan secara akuntabel dan transparan. Mendasarkan pada kebutuhan-kebutuhan tersebut maka diperlukan adanya pedoman peningkatan kompetensi berupa silabus pelatihan yang terstruktur mulai dari jenjang dasar hingga tingkat ahli (ToT) guna menjamin penyelenggaraan layanan yang berkualitas, terstandar, dan berkelanjutan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan silabus ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan bimbingan teknis dan pelatihan bagi PSKS maupun pengelola Puskesmas pada berbagai tingkatan kompetensi.

Adapun tujuan utama dari penyusunan silabus adalah:

1. **Meningkatkan kompetensi** (pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja) PSKS dalam mengelola Puskesmas secara profesional dan mengimplementasikannya pada program Kecamatan Berdaya.
2. **Mewujudkan sinergi** dan akselerasi pemahaman peserta pelatihan guna mendukung keberhasilan implementasi program di lapangan.
3. **Menghasilkan tenaga pelatih (*trainer*)** yang kompeten sebagai fasilitator, pendamping, dan pengembang kapasitas pengelola Puskesmas agar Peningkatan keterampilan PSKS dalam memberikan pelayanan yang profesional.
4. **Mengoptimalkan peran Puskesmas** dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan kebutuhan layanan sosial secara presisi pada pilar-pilar Kecamatan Berdaya.

C. MANFAAT

Implementasi dari silabus ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi PSKS dan Pengelola Puskesmas
 - a. Meningkatkan profesionalisme dan keterampilan dalam manajemen kasus, komunikasi interpersonal, teknik advokasi, dan penguasaan teknologi informasi,
2. Bagi Masyarakat
 - a. Memperoleh kepastian layanan sosial yang lebih responsif, empati, dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
 - b. Memperoleh pelayanan sosial yang lebih cepat, tepat sasaran, dan manusiawi melalui peran aktif PSKS yang berempati,.
3. Bagi Pemerintah Daerah
 - a. Tersedianya data kemiskinan dan keluhan sosial yang valid untuk perencanaan program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
 - b. Terciptanya hubungan profesional dan kemitraan yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

D. SASARAN

Sasaran silabus ini dibagi berdasarkan jenjang kompetensi untuk memastikan distribusi pengetahuan yang tepat di setiap tingkatan, yaitu:

1. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS): Ditujukan bagi pelaksana di tingkat lapangan agar memiliki kompetensi dasar dan lanjutan dalam menyelenggarakan Puskesmas serta mengimplementasikan program Kecamatan Berdaya.
2. Pelaksana Kebijakan dan Pengelola Puskesmas: Mencakup staf sekretariat di tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keluhan dan integrasi layanan sosial.
3. Calon Tenaga Pelatih (Trainer): Peserta jenjang Ahli (ToT) yang dipersiapkan untuk menjadi fasilitator, pendamping, dan pengembang kapasitas bagi pengelola Puskesmas lainnya guna menjamin keberlanjutan program

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup materi dalam silabus ini mencakup beberapa aspek utama materi pelatihan dan bimbingan teknis yang dibagi berdasarkan jenjang kompetensi, yaitu:

1. Tata Kelola Kelembagaan: Meliputi dasar hukum, pembentukan struktur sekretariat, tugas dan fungsi pelaksana, serta mekanisme kerjasama dan kemitraan.
2. Implementasi Program Kecamatan Berdaya: Fokus pada optimalisasi peran Puskesmas dalam empat pilar utama (Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas, Taruna Karya Mandiri, serta Sport Center).
3. Teknis Pelayanan Sosial: Mencakup teknik wawancara, identifikasi masalah, manajemen kasus dasar, advokasi, rujukan layanan, hingga penanganan keluhan dalam kondisi kedaruratan.
4. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Pelatihan penggunaan aplikasi Puskesmas (khususnya untuk wilayah Provinsi Jawa Tengah) mulai dari tingkat desa hingga provinsi.

5. Pengembangan Kapasitas Pelatih (ToT): Meliputi analisis kebijakan daerah, teknik fasilitasi pembelajaran orang dewasa (andragogi), komunikasi efektif, dan metode *microteaching* bagi calon trainer

F. METODOLOGI

Untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif, pelatihan ini menggunakan pendekatan Andragogi (Pembelajaran Orang Dewasa) dengan metode yang bervariasi sebagai berikut:

1. Model Pelatihan: Diselenggarakan melalui dua model, yaitu Tatap Muka (Luring/Onsite) untuk pendalaman praktik yang lebih intensif, serta Daring (Online) untuk penyampaian teori dan koordinasi.
2. Teknik Pembelajaran Partisipatif: Mengutamakan keterlibatan aktif peserta melalui:
 - a. Ceramah dan Diskusi: Untuk pemahaman konsep, dasar hukum, dan analisis kebijakan.
 - b. Studi Kasus: Melakukan analisis terhadap permasalahan nyata dalam penyelenggaraan Puskesmas di daerah.
 - c. Simulasi dan Roleplay: Praktik teknik wawancara, manajemen kasus dasar, hingga penanganan keluhan dalam kondisi darurat.
 - d. Praktik Lapangan/Keterampilan Teknis: Mencakup kegiatan kunjungan rumah (*home visit*), dokumentasi sosial, serta simulasi proses bisnis pada aplikasi sistem informasi Puskesmas.
 - e. *Microteaching*: Khusus untuk jenjang ToT, di mana peserta mempraktikkan teknik mengajar dan memfasilitasi materi di depan kelas.
3. Media Pembelajaran: Penggunaan bahan ajar terstruktur, media visual, dan perangkat teknologi informasi (komputer/laptop) untuk mendukung penguasaan aplikasi digital.

G. EVALUASI PEMBELAJARAN

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap jenjang pelatihan, mulai dari tingkat dasar hingga ahli, mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan, yaitu peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja para peserta. Evaluasi dalam pelatihan ini

bukan sekadar menilai keberhasilan program, melainkan untuk mengukur sejauh mana terjadi transformasi dan peningkatan kapasitas pada diri PSKS sebagai ujung tombak pelayanan. Evaluasi kompetensi individu ini sangat penting karena:

1. Menjamin Penguasaan Pengetahuan Teknis: Memastikan setiap personel PSKS benar-benar Peningkatan pemahaman PSKS dalam dasar hukum, tugas, fungsi, serta mekanisme tata kelola Puskesmas dan program Kecamatan Berdaya.
2. Memastikan Kemahiran Keterampilan Praktis: Memverifikasi kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman PSKS dalam melakukan tindakan nyata di lapangan, mulai dari teknik wawancara, manajemen kasus dasar, hingga kemahiran mengoperasikan aplikasi sistem informasi.
3. Menstandarisasi Sikap Kerja dan Etika: Menilai kesiapan mental dan moral PSKS dalam memberikan pelayanan, seperti tingkat empati, menjaga kerahasiaan penerima layanan, serta integritas dalam menjalankan tugas.
4. Mengukur Kesiapan Sebagai Fasilitator (Khusus ToT): Menilai kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman individu pada jenjang Ahli untuk menjadi narasumber yang Peningkatan keterampilan PSKS dalam menyampaikan materi secara sistematis dan mudah dipahami oleh pengelola lainnya.

Metode evaluasi yang diterapkan dirancang untuk mengukur tiga aspek utama kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) secara komprehensif:

1. Evaluasi Pengetahuan (Kognitif): Dilakukan melalui tinjauan (*review*) dan pengujian terhadap pemahaman PSKS mengenai regulasi, alur data aplikasi, serta konsep-konsep dasar pembangunan sosial pada pilar Kecamatan Berdaya.
2. Simulasi dan Uji Keterampilan Praktis:
 - a. Praktik Manajemen Kasus & Home Visit: Menilai kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman PSKS dalam mengidentifikasi masalah secara presisi dan melakukan pendokumentasian sosial.

- b. Simulasi Proses Bisnis Aplikasi: Menguji keterampilan teknis dalam menginput, memverifikasi, dan memvalidasi data aduan masyarakat pada sistem informasi.
 - c. Roleplay Komunikasi: Menilai kemahiran *interpersonal skill* dalam membangun hubungan profesional, melakukan advokasi dasar, serta menangani keluhan dalam kondisi darurat.
3. Observasi Sikap Kerja (Afektif): Penilaian langsung selama proses pelatihan terhadap perilaku PSKS, termasuk keramahan (*service excellent*), sensitivitas terhadap persoalan masyarakat, dan keterbukaan terhadap kritik atau masukan.
 4. Metode Microteaching (Khusus Jenjang Ahli): Evaluasi melalui praktik mengajar secara terbatas untuk menilai keterampilan komunikasi, presentasi efektif, dan penguasaan teknik pembelajaran orang dewasa (andragogi) pada calon pelatih.
 5. Analisis Studi Kasus: Mengukur kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman berpikir kritis dan analitis PSKS dalam merumuskan solusi atau rekomendasi perbaikan berdasarkan permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat.

— kreasi —

BAB II

SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR

A. SILABUS

Judul Unit Kompetensi : Peran dan Fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Implementasi Kecamatan Berdaya

Jenjang Kompetensi : Dasar

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk Peningkatan pemahaman PSKS dalam dan meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan Puskesmas dan mengimplementasikan program Kecamatan Berdaya.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 12 JP (5 JP pengetahuan + 7 JP keterampilan)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Mengoptimalkan Peran dan Fungsi	1. Pemahaman komprehensif peserta	1. Pengetahuan a. Peningkatan Pemahaman	1. Peningkatan pemahaman PSKS dalam	1. Menumbuhkan jiwa kerelawanan	1. Ramah dan supel dalam berinteraksi	2 JP	4 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Implementasi Program Kecamatan Berdaya	pelatihan guna meningkatkan peran dan fungsinya dalam implementasi program Kecamatan Berdaya	tentang Peran dan Fungsi PSKS; b. Peningkatan Pemahaman tentang Program Kecamatan Berdaya 2. Keterampilan a. Peningkatan Keterampilan peserta tentang fungsi PSKS dalam penanganan masalah sosial b. Peningkatan Keterampilan peserta tentang penerimaan aduan dan penanganan masalah sosial	tentang dasar ilmu pekerjaan sosial 2. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang dasar 4 (empat) pilar Program Kecamatan Berdaya 3. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang pedoman standar implementasi Kecamatan Berdaya. 4. Peningkatan pemahaman PSKS dalam	dan kepekaan sosial 2. Menumbuhkan kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman menginspirasi, menggerakkan, dan membangkitkan kemandirian kolektif warga. 3. Meningkatkan kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman dalam menginisiasi, mengembangkan, dan mengelola jejaring strategis lintas sektor.	dan berkomunikasi 2. Terbuka terhadap kritik, saran dan masukan 3. Mudah bersosialisasi dan bekerjasama 4. Cakap dalam berkomunikasi 5. Empati dan sensitif terhadap persoalan-persoalan masyarakat 6. Kritis dan analitis		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		dalam konteks Kecamatan Berdaya 3. Sikap a. Berempati dalam mendengarkan, Peningkatan pemahaman PSKS dalam dan merespon keluhan masyarakat b. Peduli dan peka terhadap permasalahan serta kebutuhan sosial masyarakat c. Menghormati martabat, hak dan kerahasiaan	tentang peran PSKS dalam implementasi Program Kecamatan Berdaya.		terhadap permasalahan 7. Jeli dalam menangkap permasalahan dan peluang solusi		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		penerima layanan d. Bersikap jujur, bertanggung jawab dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan					
	2. Keterampilan komprehensif peserta pelatihan guna mewujudkan sinergi dan keberhasilan implementasi Program Kecamatan Berdaya melalui sistem layanan aduan dan rujukan terpadu	1. Pengetahuan ➤ Peningkatan Keterampilan Peserta pelatihan tentang sistem layanan aduan dan rujukan terpadu dalam implementasi Program Kecamatan Berdaya 2. Keterampilan	1. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang mekanisme assesment, analisa masalah dan penyusunan rencana intervensi dalam ilmu pekerjaan sosial	1. Peningkatan keterampilan PSKS dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan memetakan secara tepat kebutuhan jenis layanan berdasarkan aduan yang masuk	1. Teliti dan cermat dalam mengumpulkan data dan informasi 2. Teliti dan cermat dalam mengidentifikasi dan menganalisa potensi permasalahan	3 JP	3 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		➤ Peningkatan keterampilan Peserta pelatihan tentang pelayanan aduan dan rujukan terpadu dalam implementasi Program Kecamatan Berdaya 3. Sikap a. Berempati dalam mendengarkan, Peningkatan pemahaman PSKS dalam dan merespon keluhan masyarakat b. Peduli dan peka terhadap	2. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang sistem layanan aduan dan rujukan terpadu dalam implementasi Program Kecamatan Berdaya 3. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) sebagai “rumah” bagi berjalannya sistem	2. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menentukan skema intervensi sosial pada Pilar Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas, Taruna Karya Mandiri, serta Sport Center. 3. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menyusun dan mengimplementasikan alur pelayanan (<i>flowchart</i>) serta rujukan	han maupun solusi terkait 4 (empat) pilar di Program Kecamatan Berdaya 3. Jelas dan mudah dipahami dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 4. Kreatif dan inovatif dalam mengembangkan upaya-upaya rujukan dan penyelesaian		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		permasalahan serta kebutuhan sosial masyarakat c. Menghormati martabat, hak dan kerahasiaan penerima layanan d. Bersikap jujur, bertanggung jawab dan berintegritas dalam menjalankan tugas pelayanan	layanan aduan dan rujukan	yang responsif sesuai dengan karakteristik Pilar Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak, Perlindungan Lansia dan Disabilitas, Taruna Karya Mandiri, serta Sport Center. 4. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan koordinasi, pengorganisasian dan menggerakkan potensi sumber dalam struktur kelembagaan Kecamatan	5. Informatif dan berwawasan luas dalam merespon permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang terkait 4 (empat) pilar dalam program Kecamatan Berdaya		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
				Berdaya secara sinergis, akuntabel, dan terintegrasi melalui Pusat Kesejahteraan Sosial			

SI-PANDU
-kreasi-

B. EVALUASI TINGKAT DASAR

1. Pre Test

1. Apa prinsip utama yang mendasari konsep 'Kecamatan Berdaya' dalam konteks pembangunan daerah?
 - A. Kemandirian masyarakat lokal.
 - B. Ketergantungan pada bantuan dana.
 - C. Pemberian instruksi dari atasan.
 - D. Sentralisasi pengambilan keputusan.
2. Manakah yang merupakan tujuan jangka panjang dari program Kecamatan Berdaya?
 - A. Membangun gedung kantor baru.
 - B. Menambah jumlah staf administrasi.
 - C. Menghabiskan anggaran tahunan daerah.
 - D. Meningkatkan kualitas hidup warga.
3. Dalam tahapan partisipasi masyarakat, tindakan manakah yang menunjukkan level partisipasi tertinggi?
 - A. Terlibat dalam pengambilan keputusan.
 - B. Menghadiri undangan sosialisasi saja.
 - C. Menerima informasi hasil rapat.
 - D. Menjadi penonton dalam kegiatan.
4. Prinsip tata kelola 'transparansi' dalam pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya di tingkat kecamatan diwujudkan melalui:
 - A. Pembatasan informasi kepada media.
 - B. Pengambilan keputusan sepihak.
 - C. Akses publik terhadap laporan.
 - D. Penyimpanan data secara rahasia.
5. Mengapa pemetaan potensi lokal menjadi langkah krusial dalam program Kecamatan Berdaya?
 - A. Menghilangkan peran sektor swasta.
 - B. Penyeragaman produk antar wilayah.
 - C. Optimalisasi sumber daya spesifik.
 - D. Mempermudah proses impor barang.
6. Sinergi stakeholder dalam konsep Pentahelix Program Kecamatan Berdaya melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan:
 - A. Lembaga pemasyarakatan luar.
 - B. Organisasi intelijen negara.
 - C. Kelompok kepentingan politik.
 - D. Sektor dunia usaha.
7. Apa karakteristik utama dari inovasi pelayanan publik di kecamatan yang berdaya?
 - A. Wajib menggunakan kertas fisik.
 - B. Kemudahan akses bagi warga.
 - C. Penggunaan biaya yang mahal.
 - D. Prosedur yang semakin panjang.

8. Apa peran utama Puskesmas di tingkat desa/kelurahan dalam kerangka program Kecamatan Berdaya?
 - A. Unit penyedia modal usaha mandiri desa.
 - B. Lembaga eksekutif pengelola dana bantuan.
 - C. Pusat informasi dan rujukan pelayanan sosial.
 - D. Instansi penegak hukum masalah sosial.
9. Dalam implementasi Kecamatan Berdaya, bagaimana Puskesmas berkontribusi terhadap keakuratan data kemiskinan?
 - A. Menghapus semua data warga yang tidak memiliki KTP.
 - B. Menentukan standar kemiskinan secara mandiri.
 - C. Membatasi pendaftaran warga miskin yang baru.
 - D. Melakukan verifikasi dan validasi DTKS berkala.
10. Sistem yang menghubungkan Puskesmas di desa dengan layanan di tingkat kecamatan atau kabupaten disebut dengan...
 - A. Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
 - B. Sistem Informasi Geografis Terpadu.
 - C. Sistem Manajemen Kepegawaian Desa.
 - D. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu.
11. Manakah yang merupakan kelompok sasaran utama (PPKS) dalam layanan Puskesmas?
 - A. Warga lansia telantar dan penyandang disabilitas.
 - B. Mahasiswa yang ingin melakukan riset skripsi.
 - C. Pengusaha lokal yang sedang mencari mitra kerja.
 - D. Seluruh ASN yang berdomisili di desa.
12. Salah satu pilar 'Kecamatan Berdaya' adalah kemandirian ekonomi. Apa bentuk dukungan konkret dari Puskesmas?
 - A. Menyita aset warga yang tidak Peningkatan keterampilan PSKS dalam bayar pajak.
 - B. Memberikan pinjaman bunga rendah secara tunai.
 - C. Mengambil alih seluruh pengelolaan pasar desa.
 - D. Memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi PMKS.
13. Dalam struktur Kecamatan Berdaya, koordinasi tingkat kecamatan dilakukan oleh...
 - A. Bendahara Kecamatan secara eksklusif.
 - B. Hanya oleh pihak kepolisian sektor setempat.
 - C. Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
 - D. Unit Pemadam Kebakaran tingkat Kecamatan.
14. Apa indikator keberhasilan utama Puskesmas dalam mendukung program Kecamatan Berdaya?
 - A. Menurunnya jumlah keluhan layanan sosial masyarakat.
 - B. Terintegrasinya layanan dan graduasi mandiri warga.
 - C. Semakin banyaknya warga yang menerima bantuan tunai.
 - D. Meningkatnya jumlah staf administratif di kantor desa.

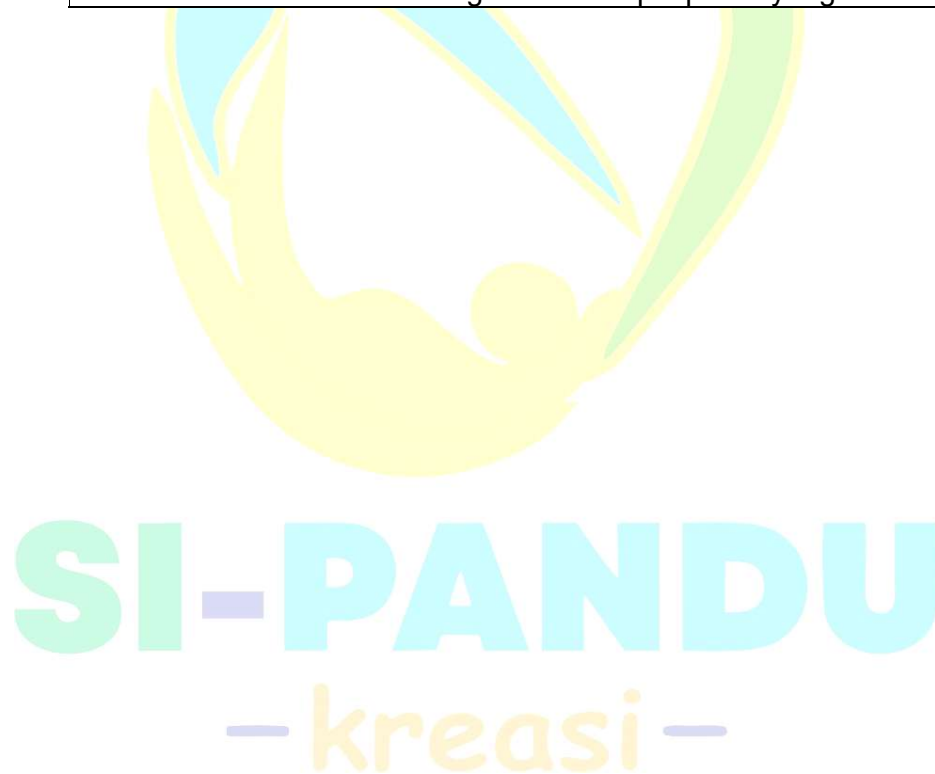
15. Prinsip utama yang harus dipegang oleh relawan Puskesmas dalam menjalankan tugasnya adalah...
- A. Kerahasiaan data dan empati terhadap warga.
 - B. Memprioritaskan kerabat dekat dalam daftar bantuan.
 - C. Eksklusivitas dan kepentingan politik tertentu.
 - D. Bekerja hanya saat ada kunjungan pejabat daerah.
16. Manakah yang merupakan pilar utama dalam operasional Puskesmas untuk menjamin keberlanjutan program Kecamatan Berdaya?
- A. Kepemilikan aset kendaraan operasional mewah.
 - B. Gedung kantor yang megah dan luas.
 - C. Jumlah personil keamanan yang mencukupi.
 - D. Sumber daya manusia dan sistem informasi.
17. Salah satu tantangan dalam implementasi Puskesmas adalah 'fragmentasi layanan'. Solusi yang ditawarkan Kecamatan Berdaya adalah...
- A. Penghapusan seluruh program bantuan daerah.
 - B. Pembatasan jumlah warga yang boleh melapor.
 - C. Koordinasi lintas sektor dalam satu pintu.
 - D. Pemisahan gedung setiap jenis layanan sosial.
18. Dalam struktur Kecamatan Berdaya, siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi langsung terhadap kinerja Puskesmas?
- A. Ketua asosiasi pedagang pasar kecamatan.
 - B. Pimpinan organisasi masyarakat setempat.
 - C. Camat dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - D. Lembaga swadaya masyarakat internasional.
19. Apa tujuan fundamental dari inisiatif 'Kecamatan Berdaya' dalam struktur pemerintahan daerah?
- A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak desa.
 - B. Menghapus peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota.
 - C. Sentralisasi seluruh bantuan sosial ke tingkat kabupaten.
 - D. Membangun kemandirian kecamatan dalam pelayanan sosial.
20. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memantau program Kecamatan Berdaya?
- A. Mengambil alih tugas administrasi di kantor desa.
 - B. Menutup akses jalan menuju kantor kecamatan.
 - C. Memberikan umpan balik melalui kotak saran atau aplikasi.
 - D. Meminta imbalan uang untuk setiap laporan yang masuk.

2. Post Test

1. Apa inti dari transformasi paradigma unit kecamatan dalam Program Kecamatan Berdaya dibandingkan dengan model administratif sebelumnya?
 - A. Menjadi instansi tunggal pengelolaan dana desa.
 - B. Menjadi pusat validasi dokumen kependudukan.
 - C. Menjadi episentrum perlindungan kelompok rentan.
 - D. Menjadi pusat penerbitan rekomendasi perizinan.
2. Dalam pilar Perlindungan Lansia dan Disabilitas, program 'SPELING' (Dokter Spesialis Keliling) bertujuan untuk memberikan layanan apa?
 - A. Kesehatan gratis langsung ke tingkat desa.
 - B. Pendampingan hukum bagi kelompok rentan.
 - C. Pemberian bantuan modal usaha kreatif.
 - D. Pembagian alat bantu disabilitas massal.
3. Siapa kelompok sasaran utama dari pilar program Taruna Karya Mandiri dalam modul ini?
 - A. Seluruh warga kecamatan tanpa batasan usia.
 - B. Warga lansia yang ingin tetap produktif.
 - C. Pemuda produktif usia 16 hingga 30 tahun.
 - D. Anak usia sekolah dasar hingga menengah.
4. Apa tujuan utama dari penguatan Puskesmas di tingkat kecamatan dalam kerangka 'Kecamatan Berdaya'?
 - A. Hanya sebagai tempat penyimpanan logistik bantuan.
 - B. Menjadi pusat koordinasi rujukan antar-desa.
 - C. Menghapus peran dinas sosial kabupaten.
 - D. Mengambil alih seluruh kewenangan bantuan desa.
5. Dalam alur Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), apa peran utama sekretariat Puskesmas di kecamatan?
 - A. Pendanaan seluruh program kemiskinan desa.
 - B. Menunjuk langsung warga sebagai penerima PKH.
 - C. Verifikasi dan validasi rujukan dari desa.
 - D. Pencetakan kartu bantuan sosial secara mandiri.
6. Bagaimana cara Puskesmas kecamatan menangani keluhan warga yang tidak masuk dalam DTKS tetapi kondisinya sangat miskin?
 - A. Mengabaikan keluhan karena data sudah final.
 - B. Menyarankan warga untuk pindah domisili.
 - C. Memberikan uang pribadi petugas kepada warga.
 - D. Melakukan registrasi melalui mekanisme usulan baru.
7. Dalam struktur Puskesmas Kecamatan Berdaya, siapa yang idealnya menjadi penanggung jawab organisasi?
 - A. Camat.

- B. Tenaga sukarela yang baru bergabung.
 - C. Pihak swasta pemberi bantuan CSR.
 - D. Ketua Karang Taruna unit terkecil.
8. Mengapa penting bagi Puskesmas kecamatan untuk memiliki sistem pencatatan 'Front Office' dan 'Back Office'?
- A. Agar kantor terlihat mewah seperti bank.
 - B. Untuk memisahkan penerimaan keluhan dan pemrosesan.
 - C. Untuk menggandakan jumlah pegawai honorer.
 - D. Agar warga tidak bisa bertemu petugas inti.
9. Bagaimana peran optimal seorang Camat dalam mendukung keberhasilan Kecamatan Berdaya?
- A. Sebagai fasilitator dan dinamisator kolaborasi antar sektor
 - B. Sebagai pemeriksa administrasi keuangan di akhir tahun
 - C. Sebagai pelaksana tunggal seluruh kegiatan lapangan
 - D. Sebagai pemberi keputusan mutlak tanpa diskusi
10. Dalam menghadapi kendala minimnya anggaran daerah, apa langkah kreatif yang dapat diambil dalam program Kecamatan Berdaya?
- A. Mengajukan pinjaman bank atas nama individu pengelola
 - B. Meminta iuran wajib kepada warga kurang Peningkatan keterampilan PSKS dalam
 - C. Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta (CSR)
 - D. Menghentikan seluruh kegiatan sampai anggaran tersedia
11. Manakah yang merupakan pilar utama dalam operasional Puskesmas untuk menjamin keberlanjutan program Kecamatan Berdaya?
- A. Kepemilikan aset kendaraan operasional mewah.
 - B. Gedung kantor yang megah dan luas.
 - C. Jumlah personil keamanan yang mencukupi.
 - D. Sumber daya manusia dan sistem informasi.
12. Salah satu tantangan dalam implementasi Puskesmas adalah 'fragmentasi layanan'. Solusi yang ditawarkan Kecamatan Berdaya adalah...
- A. Penghapusan seluruh program bantuan daerah.
 - B. Pembatasan jumlah warga yang boleh melapor.
 - C. Koordinasi lintas sektor dalam satu pintu.
 - D. Pemisahan gedung setiap jenis layanan sosial.
13. Dalam struktur Kecamatan Berdaya, siapa yang bertanggung jawab melakukan supervisi langsung terhadap kinerja Puskesmas?
- A. Ketua asosiasi pedagang pasar kecamatan.

- B. Pimpinan organisasi masyarakat setempat.
 - C. Camat dan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
 - D. Lembaga swadaya masyarakat internasional.
14. Apa tujuan fundamental dari inisiatif 'Kecamatan Berdaya' dalam struktur pemerintahan daerah?
- A. Meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak desa.
 - B. Menghapus peran dinas sosial di tingkat kabupaten/kota.
 - C. Sentralisasi seluruh bantuan sosial ke tingkat kabupaten.
 - D. Membangun kemandirian kecamatan dalam pelayanan sosial.
15. Bagaimana cara masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam memantau program Kecamatan Berdaya?
- A. Mengambil alih tugas administrasi di kantor desa.
 - B. Menutup akses jalan menuju kantor kecamatan.
 - C. Memberikan umpan balik melalui kotak saran atau aplikasi.
 - D. Meminta imbalan uang untuk setiap laporan yang masuk.



BAB III

SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI LANJUTAN

A. SILABUS

Judul Unit Kompetensi : Penyelenggaraan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)

Jenjang Kompetensi : Lanjutan

Deskripsi Unit Kompetensi : Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk Peningkatan pemahaman PSKS dalam dan mengimplementasikan perencanaan program Puskesmas guna meningkatkan kompetensi yang dibutuhkan oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dalam melakukan penyelenggaraan Puskesmas dan implementasinya pada program Kecamatan Berdaya.

Perkiraan Waktu Pelatihan : 20 JP (8 JP pengetahuan + 12 JP keterampilan)

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
1. Penyelenggaraan Puskesmas	1.1. Peningkatan pemahaman PSKS tentang Pembentukan dan Tata Kelola	1. Pengetahuan : a. Pemahaman tentang dasar-dasar	1. Dasar hukum penyelenggaraan Puskesmas di	1. <i>Interpersonal skill</i> (empati, mendengarkan aktif, komunikasi,	1. Etika pelayanan sosial (menjaga martabat,	2 JP	3 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
	Kelembagaan Puskesmas	pembentukan Puskesmas b. Pemahaman tentang pembentukan kelembagaan Puskesmas. c. Pemahaman tentang tata kelola kelembagaan Puskesmas. 2. Keterampilan a. Peningkatan keterampilan PSKS sebagai komunikator yang baik bagi masyarakat b. Peningkatan keterampilan PSKS untuk menjadi	tingkat Kabupaten/ Kota hingga Desa/ Kelurahan 2. Tujuan pembentukan kelembagaan Puskesmas 3. Asas penyelenggaraan Puskesmas 4. Tugas dan fungsi Puskesmas di masing-masing tingkatan 5. Prosedur pembentukan Puskesmas.	membangun hubungan profesional) 2. Teknik wawancara 3. Teknik identifikasi masalah 4. Praktek manajemen kasus dasar 5. <i>Problem solving</i> 6. Home Visit 7. Dokumentasi sosial	hak dan kerahasiaan penerima layanan) 2. Empati dalam mendengarkan keluhan masyarakat 3. Kepekaan dan kepedulian sosial terhadap permasalahan sosial di lingkungan sekitar		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		pendengar yang baik secara aktif sehingga dapat Peningkatan pemahaman PSKS dalam persoalan dan kebutuhan masyarakat c. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan wawancara dasar untuk menggali masalah dan kebutuhan masyarakat d. Peningkatan keterampilan PSKS dalam memberikan informasi mengenai program	6. Struktur kelembagaan Puskesmas 7. Kerjasama dan kemitraan Puskesmas 8. Mekanisme dan prosedur pengelolaan keluhan. 9. Pelayanan Puskesmas dalam kondisi kedaruratan				

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		perlindungan dan kesejahteraan sosial secara jelas dan tepat e. Peningkatan keterampilan PSKS dalam memberikan pelayanan penerimaan pengaduan dan permohonan layanan sesuai prosedur f. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan pencatatan, pendokumentasian dan pelaporan					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		3. Sikap Kerja a. Berempati dalam mendengarkan, Peningkatan pemahaman PSKS dalam dan merespon keluhan masyarakat b. Peduli dan peka terhadap permasalahan serta kebutuhan sosial masyarakat c. Menghormati martabat, hak dan kerahasiaan penerima layanan d. Bersikap jujur, bertanggung jawab dan berintegritas					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		dalam menjalankan tugas pelayanan					
	1.2. Peningkatan Keterampilan PSKS dalam Implementasi Puseksos pada Kecamatan Berdaya	1. Pengetahuan a. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang kedudukan Puskesmas pada Kecamatan Berdaya b. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang pelaksanaan layanan Puskesmas pada Kecamatan Berdaya 2. Keterampilan a. Peningkatan keterampilan PSKS dalam	1. Review Konsep Kecamatan Berdaya 2. Maksud, tujuan, tugas dan tanggung jawab PSKS dalam Puskesmas pada program Kecamatan Berdaya 3. Mekanisme dan prosedur pengelolaan keluhan dan	1. Teknik membangun hubungan profesional 2. Penanganan keluhan di masyarakat 3. Advokasi dasar dalam ilmu pekerjaan sosial 4. Rujukan layanan 5. Pemberdayaan individu dan kelompok 6. Kolaborasi dan jejaring 7. Monitoring dan evaluasi	1. Integritas dalam pelayanan 2. <i>Service excellent</i> 3. Semangat kolaboratif dalam penanganan masalah sosial 4. Komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat	3 JP	4 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		membangun kerjasama dan sinergi dengan pemerintah, masyarakat, maupun stakeholder lainnya b. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menerima, merespon, dan menindaklanjuti keluhan atau aduan secara profesional c. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan pendampingan aktif pemberdayaan masyarakat dan peningkatan	aduan masyarakat 4. Gambaran umum aplikasi Puskesmas 5. Alur data aplikasi Puskesmas	8. Praktek pemanfaatan aplikasi atau sistem informasi			

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		kesejahteraan sosial 3. Sikap Kerja a. Menunjukkan perilaku jujur, berintegritas dan bertanggung-jawab dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana Puskesmas d. Menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, ramah, profesional dan berorientasi pada kebutuhan penerima layanan					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		e. Peningkatan keterampilan PSKS dalam bekerjasama dan membangun hubungan yang harmonis dan dengan masyarakat, pemerintah dan mitra kerja 4. Memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial					
	1.3. Peningkatan Keterampilan PSKS tentang aplikasi Puskesmas Provinsi Jawa Tengah	1. Pengetahuan a. Peningkatan pemahaman PSKS dalam tentang pendataan aduan	1. Gambaran umum aplikasi Puskesmas 2. Struktur menu aplikasi	1. Dasar dasar penggunaan aplikasi di computer/ laptop / perangkat lainnya	1. Objektif 2. Menjaga kerahasiaan data dan aduan	3 JP	5 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		/keluhan masyarakat b. Peningkatan pemahaman PSKS dalam struktur menu aplikasi pada tingkat desa/kelurahan c. Peningkatan pemahaman PSKS dalam struktur menu aplikasi untuk supervisor Puskesmas d. Peningkatan pemahaman PSKS dalam struktur menu aplikasi Puskesmas untuk Dinas Sosial Kabupaten/Kota	pada tingkat desa/kelurahan 3. Struktur menu aplikasi untuk supervisor Puskesmas 4. Struktur menu aplikasi Puskesmas untuk Dinas Sosial Kabupaten/Kota 5. Struktur menu aplikasi Puskesmas untuk Dinas Sosial Provinsi	2. Penginputan data aduan/keluhan masyarakat di aplikasi 3. Teknik identifikasi dan asesmen awal 4. Teknik verifikasi dan validasi data 5. Pengelolaan data penerima layanan 6. Teknik penanganan dan tindak lanjut aduan 7. Simulasi proses bisnis layanan Puskesmas	3. Berorientasi pada pelayanan masyarakat 4. Adaptif terhadap penggunaan aplikasi 5. Akuntabel dan transparan		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		e. Peningkatan pemahaman PSKS dalam struktur menu aplikasi Puskesmas untuk Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah f. Peningkatan pemahaman PSKS dalam alur data pada aplikasi Puskesmas g. Peningkatan pemahaman PSKS dalam proses bisnis aplikasi Puskesmas 2. Keterampilan a. Peningkatan keterampilan PSKS dalam mengidentifikasi jenis aduan	Jawa Tengah 6. Alur data pada aplikasi Puskesmas 7. Proses bisnis aplikasi Puskesmas				

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		masyarakat dan menginput secara lengkap, benar serta sesuai prosedur c. Peningkatan keterampilan PSKS dalam mengoperasikan menu-menu pada aplikasi d. Peningkatan keterampilan PSKS dalam mengakses dan mengelola data pada aplikasi e. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melakukan tindak lanjut terhadap data yang memerlukan verifikasi					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		3. Sikap Kerja a. Memastikan data diproses sesuai tahapan b. Menjaga kerahasiaan data c. Adaptif terhadap penggunaan aplikasi d. Objektif dalam penanganan aduan					

SI-PANDU
— kreasi —

B. EVALUASI TINGKAT LANJUTAN

Pada jenjang kompetensi lanjutan ini, sebagai bahan evaluasi atas peningkatan kompetensi peserta dilakukan dengan penyusunan Rencana Aksi sebagai proses perencanaan implementasi dan praktek atas pengetahuan dan keterampilan yang diterima selama pembelajaran. Rencana Aksi disusun untuk 1 – 3 bulan pasca pelatihan, dan monitoring sebagai penilaian dilakukan oleh penyelenggara.



BAB IV

SILABUS PENINGKATAN KOMPETENSI AHLI

A. SILABUS

Judul Unit Kompetensi	: <i>Training of Trainer</i> (ToT) Pusat Kesejahteraan Sosial
Jenjang Kompetensi	: Ahli
Deskripsi Unit Kompetensi	: Unit ini meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga pelatih (trainer) yang memiliki kompetensi sebagai fasilitator, pendamping, dan pengembang kapasitas pengelola Puskesmas sehingga Peningkatan keterampilan PSKS dalam menjamin penyelenggaraan layanan Puskesmas yang berkualitas, terstandar, dan berkelanjutan.
Perkiraan Waktu Pelatihan	: 20 JP
Materi	: Aspek teknis yang diberikan pada pelatihan jenjang ToT (<i>Training of Trainers</i>) Pusat Kesejahteraan Sosial dengan jenjang kompetensi Ahli terbagi ke dalam dua elemen kompetensi utama, yaitu analisis kebijakan dan fasilitasi pembelajaran, sebagai berikut: 1. Aspek Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Puskesmas Materi ini difokuskan pada peningkatan pemahaman dan keterampilan PSKS sebagai calon pelatih dalam memfasilitasi peserta untuk:

- a. Tinjauan (Review) Komprehensif: Mencakup konsep dasar Puskesmas dalam sistem kesejahteraan sosial, kebijakan dan regulasi, tugas, fungsi, peran, kewenangan, serta tata kelola penyelenggaraan Puskesmas.
 - b. Evaluasi dan Analisis: Teknik analisis kebijakan penyelenggaraan Puskesmas, evaluasi implementasi di lapangan, dan analisis studi kasus.
 - c. Pengembangan Strategis: Teknik identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan Puskesmas, penyusunan rekomendasi penguatan berdasarkan hasil evaluasi, serta penyusunan rencana tindak lanjut,.
 - d. Berbagi Pengalaman: Penyampaian praktik baik (*best practices*) Puskesmas di daerah sebagai percontohan bagi wilayah lain.
2. Aspek Fasilitasi Pembelajaran (Teknik Melatih)
- Materi ini membekali calon pelatih dengan keterampilan untuk menyampaikan materi kepada pengelola Puskesmas secara efektif:
- a. Metodologi Pembelajaran: Konsep dasar pembelajaran orang dewasa (Andragogi), pemahaman karakteristik peserta pelatihan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran.
 - b. Teknik Fasilitasi: Metode dan teknik pembelajaran partisipatif, teknik fasilitasi diskusi, dan penggunaan media pembelajaran,.

- c. Komunikasi dan Presentasi: Prinsip komunikasi efektif, teknik presentasi, serta komunikasi interpersonal dalam konteks pelatihan.
- d. Desain Pelatihan: Teknik menyusun bahan ajar, pemilihan media, dan penentuan metode pembelajaran yang sesuai.
- e. Praktik Lapangan: Pelaksanaan simulasi atau *microteaching* penyelenggaraan Puskesmas untuk menguji kesiapan calon pelatih.

Tabel Silabus Unit Kompetensi :

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
ToT Puskesmas	1.1.Menganalisis kebijakan penyelenggaraan Puskesmas di daerah	1. Pengetahuan : a. Kemampuan untuk menjelaskan kebijakan nasional dan daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan Puskesmas b. Kemampuan untuk menjelaskan konsep, tujuan, fungsi dan	1. Review Konsep dasar Puskesmas dalam sistem kesejahteraan sosial 2. Review Kebijakan dan regulasi terkait penyelenggaraan Puskesmas	1. Teknik analisis kebijakan penyelenggaraan Puskesmas 2. Analisis studi kasus penyelenggaraan Puskesmas 3. Teknik identifikasi permasalahan dan kebutuhan pengembangan Puskesmas	1. Kepemimpinan dan tanggungjawab sebagai trainer Puskesmas 2. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial 3. Kolaborasi dan kemitraan	4 JP	6 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		prinsip penyelenggaraan Puskesmas c. Kemampuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Puskesmas 2. Keterampilan untuk merumuskan rekomendasi penguatan Puskesmas di daerah a. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menganalisis kebijakan penyelenggaraan Puskesmas di daerah	3. Review Tugas, fungsi, peran dan kewenangan Puskesmas 4. Review Tata kelola penyelenggaraan Puskesmas 5. Evaluasi implementasi Puskesmas 6. Praktik baik Puskesmas di daerah sebagai percontohan bagi Puskesmas lainnya 7. Rekomendasi penguatan	4. Penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut 5. Teknik fasilitasi diskusi, studi kasus	dengan pemangku kepentingan 4. Berorientasi pada pelayanan, akuntabilitas dan kepentingan masyarakat		

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		b. Peningkatan keterampilan PSKS dalam mengidentifikasi permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan Puskesmas c. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menyusun rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Puskesmas berdasarkan hasil evaluasi d. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menjadi narasumber dan fasilitator	puskesmas dari hasil evaluasi				

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		dalam menyampaikan materi Puskesmas kepada peserta pelatihan 3. Sikap Kerja a. Bersikap objektif dan profesional dalam menganalisis kebijakan b. Menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial c. Bersikap terbuka					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		terhadap masukan dan perkembangan kebijakan d. Mendorong kolaborasi dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Puskesmas					
	1.2. Memfasilitasi pembelajaran penyelenggaraan Puskesmas bagi pengelola Puskesmas	1. Pengetahuan a. Peningkatan pemahaman PSKS tentang prinsip pembelajaran orang dewasa b. Peningkatan pemahaman PSKS dalam metode dan teknik fasilitasi pembelajaran partisipatif	1. Konsep dasar pembelajaran orang dewasa 2. Karakteristik peserta pelatihan 3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan	1. Menyusun bahan ajar, media dan metode 2. Teknik komunikasi dan presentasi efektif 3. Praktik microteaching penyelenggaraan Puskesmas	1. Komunikasi interpersonal 2. Profesionalisme dan etika fasilitator pelatihan 3. Adaptasi terhadap dinamika pembelajaran dan keberagaman peserta	4 JP	5 JP

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		c. Peningkatan pemahaman PSKS dalam strategi penyampaian materi penyelenggaraan Puskesmas secara efektif 2. Keterampilan a. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menggunakan bahan ajar, media dan metode pembelajaran yang sesuai b. Peningkatan keterampilan PSKS dalam menyampaikan materi Puskesmas secara sistematis, jelas,	pembelajar an 4. Metode dan teknik pembelajar an partisipatif 5. Prinsip komunikasi efektif 6. Penggunaan media pembelajar an				

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		dan mudah dipahami c. Peningkatan keterampilan PSKS dalam melaksanakan simulasi / microteaching penyelenggaraa n Puskesmas 3. Sikap Kerja a. Menunjukkan sikap percaya diri b. Bersikap komunikatif dan menghargai pendapat selama proses pembelajaran c. Menjunjung tinggi etika dan menjaga integritas sebagai					

Elemen Kompetensi	Kriteria Unjuk Kerja	Indikator Unjuk Kerja	Materi Pelatihan			Waktu	
			Pengetahuan	Keterampilan	Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
		fasilitator pelatihan d. Menunjukkan kemauan dan komitmen dalam pencapaian tujuan pembelajaran					

SI-PANDU
-kreasi-

B. EVALUASI

Evaluasi pada jenjang kompetensi Ahli atau *Training of Trainers* (ToT) dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa setiap calon pelatih tidak hanya menguasai substansi teknis, tetapi juga memiliki kePeningkatan keterampilan PSKS dalaman untuk mentransfer pengetahuan tersebut secara sistematis dan efektif. Mengingat peran strategis lulusan jenjang ini sebagai fasilitator dan pengembang kapasitas pengelola Puskesmas, maka evaluasi difokuskan pada tiga instrumen utama:

1. Uji Kompetensi Analisis Kebijakan dan Studi Kasus Peserta dievaluasi kePeningkatan keterampilan PSKS dalamannya dalam melakukan analisis kritis terhadap kebijakan penyelenggaraan Puskesmas di daerah. Evaluasi ini dilakukan melalui analisis studi kasus nyata yang terjadi di lapangan untuk mengukur ketajaman berpikir peserta dalam merumuskan solusi, rekomendasi perbaikan, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang strategis.
2. Simulasi Melatih (*Microteaching*) Metode *microteaching* menjadi instrumen evaluasi utama untuk menilai keterampilan fasilitasi pembelajaran. Dalam tahap ini, calon pelatih dievaluasi berdasarkan:
 - a. Keterampilan Komunikasi dan Presentasi: KePeningkatan keterampilan PSKS dalaman menyampaikan materi secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh orang dewasa (pendekatan andragogi).
 - b. Penggunaan Media dan Metode: Ketepatan dalam memilih bahan ajar serta mengelola media pembelajaran partisipatif guna menciptakan dinamika kelas yang inklusif.
 - c. Penguasaan Substansi: Kedalaman pemahaman dalam menjawab pertanyaan teknis seputar empat pilar Kecamatan Berdaya dan operasional sistem informasi Puskesmas.
3. Observasi Sikap Kerja dan Kepemimpinan (*Trainer Integrity*) Penilaian dilakukan secara berkelanjutan selama proses pelatihan untuk mengamati integritas, profesionalisme, dan etika calon pelatih. Evaluasi ini mencakup aspek kepercayaan diri, peningkatan

keterampilan PSKS dalaman menghargai pendapat orang lain, serta komitmen dalam mendorong kolaborasi lintas sektor demi peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial.

Secara keseluruhan, evaluasi ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap tenaga pelatih (trainer) yang dihasilkan memiliki standar kompetensi yang mumpuni untuk menjaga keberlanjutan program Kecamatan Berdaya di Provinsi Jawa Tengah.



BAB V

PENUTUP

Silabus Peningkatan Kompetensi Tematik Berjenjang ini merupakan dokumen hidup yang menjadi landasan utama dalam mencetak personil PSKS yang handal dan profesional. Melalui rangkaian materi yang komprehensif—mulai dari tata kelola kelembagaan, manajemen kasus, hingga pemanfaatan sistem informasi Puskesmas—diharapkan terjadi transformasi kapasitas yang signifikan pada diri peserta pelatihan.

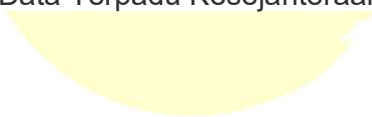
Keberhasilan implementasi program Kecamatan Berdaya sangat bergantung pada komitmen individu PSKS dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Dengan penguasaan kompetensi yang terstandar, Puskesmas diharapkan Peningkatan keterampilan PSKS dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat informasi dan rujukan yang responsif, empati, dan tepat sasaran dalam menangani berbagai permasalahan sosial di tengah masyarakat.

Evaluasi yang dilakukan secara berkala, baik melalui *pre-test*, *post-test*, simulasi, maupun penyusunan Rencana Aksi, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan kualitas pelayanan sosial. Akhirnya, sinergi antara tenaga pelatih yang kompeten dan pelaksana lapangan yang berintegritas akan menjadi fondasi kokoh bagi kemandirian kecamatan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif di Provinsi Jawa Tengah.

— kreasi —

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 400.10.2/0004464 Tahun 2025 tentang Pedoman pelaksanaan Program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2025). Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/344 Tahun 2025 tentang Tim Pembina Kecamatan Berdaya.
- Habibullah. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Terintegratif
- International Federation of Social Workers (IFSW). (n.d.). *Global Definition of Social Work*.
- Knowles, M. S. (1980). *The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (n.d.). Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



SI-PANDU
-kreasi-